

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH, DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Surakarta)



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Untuk Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun oleh :**

**HENDY SEPTYANTO**

**B 200 120 298**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH, DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PENILAIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Surakarta)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun Oleh :

**HENDY SEPTYANTO**  
**B 200 120 298**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



**Mujiwati, Dra. M.Si**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH, DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PENILAIAN KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Surakarta)

Yang ditulis oleh :

**HENDY SEPTYANTO**

**B 200 120 298**




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dra. Mujiyati, M.Si (Ketua Dewan Penguji) (  )
2. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si (Anggota 1 Dewan Penguji) (  )
3. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si (Anggota 2 Dewan Penguji) (  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak mendapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Oktober 2016

Penulis



**HENDY SEPTYANTO**  
B 200 120 298

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Surakarta)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada penilaian kinerja satuan kerja di Surakarta. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode survei dengan bantuan kuesioner instrumen penelitian berjumlah 70 buah didistribusikan langsung ke 25 unit kerja yang ada di Surakarta ditujukan langsung kepada kepala keuangan, bendahara, dan staf laporan keuangan yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 17.0. Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan Pearson korelasi dan Cronvach Alpha. Selain itu, juga dilakukan pengujian normalisasi data menggunakan plot probabilitas normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan efek positif yang signifikan terhadap penilaian kinerja satuan kerja. Besarnya *Adjusted R<sup>2</sup>* Anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah adalah 50,2%. Sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah

**Abstract**

*This study aimed to examine the effect of performance-based budgeting, the financial accounting system and financial management information systems on performance appraisal work unit area in Surakarta. The data in this study were collected by using a survey method with the help of a questionnaire research instruments totaling 70 pieces were distributed directly to 25 working units that exist in the upstream Surakarta addressed directly to the chief financial officer, treasurer, and staff compiler financial statements work on the local work force. The data in this study will be analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS software version 17.0. To test the validity and reliability of research instrument used Pearson correlation and Cronvach Alpha. Besides, it is also done testing data normalization using a normal probability plot. The results of this study indicate that the performance-based budgeting, the financial accounting system, financial management information systems and a significant positive effect on performance appraisal work unit area. The amount *Adjusted R<sup>2</sup>* Performance-based budgeting, the financial accounting system, financial management information systems area, performance assessment work unit area is 50.2%. While the remaining 49,8% is influenced by other variables that are not described in this study*

**Keywords:** *Performance-based budgeting, the financial accounting system, financial management information systems area, performance assessment work unit area.*

## 1. PENDAHULUAN

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Ramandei, 2009 : 1). Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba. Sebagai lembaga pemerintahan tujuan bukan mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Adanya pemberian otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah (Bastian,2006 : 12)

Pemerintah Daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik setiap tahun melakukan penyusunan anggaran. Untuk mengatur kegiatan perekonomian daerah, maka suatu daerah harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD) merupakan amanat rakyat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam satu tahun finansial tertentu yang dinyatakan dalam mata uang. Perwujudan amanat rakyat di sisi pemerintah daerah ini dinyatakan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, dengan demikian penyusunan anggaran pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat publik (Indra Bastian,2006).

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi.Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk

organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Penyusunan APBD berbasis prestasi atau kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar blanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal (Sem, 2012).

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah (PP No. 58 Tahun 2005). Dalam struktur pemerintah daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Sistem akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Menteri Keuangan menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP No. 13) tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal juga dengan sebutan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) merupakan sistem yang terdiri dari bermacam-macam program Penyusunan/Penganggaran APBD, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pemendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Pemendagri No. 59 Tahun 2007 No tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian Sem (2012) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini mengambil sampel di kota Dumai menunjukkan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD. Pemerintah Dumai telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran disetiap SKPD yang ada. Sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh terhadap penilaian SKPD kota Dumai sehingga memudahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan organisasi.

Penelitian Rico (2014) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan good government terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini mengambil sampel di kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat implementasi Anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula Implementasi penilaian kinerja SKPD yang dimiliki. Sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan good government juga berpengaruh terhadap penilaian SKPD.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah” yang pernah dilakukan oleh sem (2012) di kota Dumai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang sebelumnya dilakukan di Dumai dan penelitian sekarang dilakukan di Surakarta.

## **1.1 LANDASAN TEORI**

### **1.1.1. Anggaran Berbasis Kinerja**

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggung jawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah (Halim, 2004).

H1 : anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah.

### **1.1.2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Accounting Principle Board (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut : Menurut Halim (2002:138) “Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat



pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan”.

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal), juga oleh pihak di luar Pemda (eksternal), seperti DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.

H2 : sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah

### **1.1.3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sistem di definisikan Mulyono (2009) Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih, sedangkan menurut McLoad dan Schell, (2001) Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi menurut Wilkinson (1992) merupakan komoditas vital bagi sebuah organisasi atau perusahaan, yang terdiri dari data yang telah ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan.

H3: sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah.

### **1.1.4 Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Satuan kerja perangkat daerah merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya: dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga dan lainnya. Kumorotomo (2005:103), mengungkapkan kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban,

efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai”.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu dengan melakukan uji hipotesis. Metode penelitian kuantitatif ini mengarah pada analisis data-data numeric (angka) yang diolah dengan metode statistik (Sugiyono,2005).

### **2.2. Populasi, Sampel, Teknik Sampling**

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pegawai akuntansi atau bagian keuangan yang terkait dalam pengelolaan laporan keuangan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dinas Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Uma Sekaran, 2006).Kriteria penentuan sampel ini adalah:(1)Pegawai SKPD pemerintah kota Surakarta (2) Pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan (3)Yang bersedia menjadi Responden.

### **2.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer dari penelitian ini adalah beberapa jawaban kuesioner dari pegawai bagian akuntansi yang bekerja pada SKPD Surakartayang disebarkan oleh peneliti kepada responden.

### **2.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode survei (survey methods) dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu alat pengumpulan data, dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden, baik pertanyaan yang sifatnya tertutup maupun terbuka. Kuesioner ditujukan langsung kepada responden, yaitu pegawai SKPD pemerintah kota Surakarta.

### **2.5. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama yaitu Variabel Dependen yaitu penilaian kinerja SKPD.dan Variabel Independen yaitu Anggaran berbasis kinerja, Sistem akuntansi keuangan daerah, dan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran berbasis kinerja merupakan Proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pengukuran dilakukan dengan berbagai indikator. Variabel Anggaran berbasis kinerja diukur dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. pengukurannya mengadopsi dari Silalahi (2012) dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Variabel Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diukur dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju

Penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya: dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga dan lainnya. Variabel penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah diukur dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju mengadopsi dari (Silalahi,2012).

## **2.6. Metode analisis data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program *SPSS* sebagai alat untuk menguji pengaruh Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **2.6.1. Uji Instrumen Penelitian**

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur kualitas instrument dilakukan terhadap responden yang mengembalikan kuesioner. Agar dapat dipercaya dan dapat diandalkan, maka data yang diperoleh dalam penelitian harus dapat

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran, yaitu uji validitas dan uji realibilitas.

### 2.6.2. Uji Asumsi Klasik

Agar model regresi yang diajukan menunjukkan persamaan hubungan yang valid atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), model tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi dasar klasik, asumsi-asumsi tersebut adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas.

### 2.6.3. Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan melalui analisis regresi linier berganda.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada SKPD Surakarta terkait dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

**Tabel 1**

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel		$t_{hitung}$	Sig
Konstanta	2,987	1,195	0,236
ABK	0,305	3,742	0,000
SAKD	0,935	7,006	0,000
SIPKD	0,228	2,567	0,022
R Square	0,523	$F_{Hitung}$	24,144
Adjusted R Square	0,502	Probabilitas F	0,000

Dari tabel tersebut diatas dianalisis dengan menggunakan persamaan analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression analysis*) adalah sebagai berikut:

$$PKSKPD = 2,987 + 0,305ABK + 0,935SAKD + 0,228SIPKD + e$$

Keterangan :

PKSKPD : Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

$\alpha$  :Koefisien intercept (konstanta)

ABK :Anggaran Berbasis Kinerja

SAKD :Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

SIPKD :Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rumus analisis regresi linier berganda (multiple linear regression analysis) adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 2,987 menunjukkan keefektifan penilaian kinerja SKPD jika didukung oleh variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Anggaran Berbasis Kinerja adalah 0,305. Atau dapat diartikan jika pada populasi tersebut terdapat kenaikan pada Anggaran Berbasis Kinerja, maka akan terjadi kenaikan pada Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Pemerintah kota Surakarta.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variable Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah 0,935. Atau dapat diartikan jika pada populasi tersebut terdapat kenaikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka akan terjadi kenaikan pada Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Pemerintah kota Surakarta.
- 4) Nilai koefisien regresi untuk variable Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 0,228. Atau dapat diartikan jika pada populasi tersebut terdapat kenaikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan terjadi kenaikan pada Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Pemerintah kota Surakarta.

## Uji T

Hasil menunjukkan bahwa untuk variable Anggaran Berbasis Kinerja dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , maka diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $3,742 > 1,995$ ),  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Penilaian Kinerja SKPD. Selain itu dilihat dari nilai sig untuk variabel Anggaran berbasis kinerja adalah  $0,000 < \alpha = 0,05$

Selanjutnya untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , maka diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $7,006 > 1,995$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah. Dari nilai sig didapat bahwa nilai sig untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah  $0,000 < \alpha = 0,05$ .

Dan yang terhadap berdasarkan Tabel IV.14 diatas hasil untuk variabel bebas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $2,567 > 1,995$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu dilihat dari nilai sig maka nilai sig untuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah  $0,022 < \alpha = 0,05$ .

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,742 dengan  $p = 0,000$ . Oleh karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,742 > 1,995$ ) dan probabilitas  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_a$

diterima. Hal ini berarti bahwa terbukti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada SKPD Pemerintah kota Surakarta. Hasil penelitian ini sesuai atau sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silalahi (2012) dan Ales, et al (2014) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah akan memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan Kotler (2006; 97) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis kedua menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,006 dengan  $p = 0,000$ . Oleh karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $7,006 > 1,995$ ) dan probabilitas  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa terbukti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada SKPD Pemerintah kota Surakarta. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2012), Haspiarti (2012) dan Ales, et al (2014) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah akan memberikan pengaruh secara bersama-sama untuk memberikan pengaruh terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan Kotler (2006 ;79) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah adalah layanan, citra, fasilitas, Anggaran Berbasis Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. **Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,567 dengan  $p =$

0,022. Oleh karena nilai  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $2,567 > 1,995$ ) dan probabilitas  $0,022 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa terbukti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada SKPD Pemerintah kota Surakarta. Semakin tinggi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka semakin tinggi juga tingkat penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah. Jadi, keterlibatan pengelolaan keuangan dalam sistem informasi akuntansi menjadi satu faktor penting dalam keberhasilan Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada SKPD Pemerintah kota Surakarta. Penelitian ini membuktikan bahwa hasil yang didapat sesuai atau sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dan Ales, et all (2014) bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pengaruh terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah. Pendapat lain yang sesuai dengan penelitian ini, dikemukakan oleh Ardy (2013) bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Uji F**

Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  ( $24,144 > 2,70$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat.

#### **Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,502 yang menunjukkan bahwa 50,2%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen penilaian kinerja satuan kerja sebesar 50,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 49,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

### **4. PENUTUP**

#### **4.1. kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :



1. Variable Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah . Hasil analisis didapat nilai  $t_{hitung} (3,742) > t_{tabel} (1,995)$  atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Dengan demikian hipotesis  $H_1$  dalam penelitian ini diterima.
2. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil analisis didapat nilai  $t_{hitung} (7,006) > t_{tabel} (1,995)$  atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Dengan demikian hipotesis  $H_1$  dalam penelitian ini diterima.
3. Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil analisis didapat nilai  $t_{hitung} (2,567) > t_{tabel} (1,995)$  atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,022 < \alpha = 0,05$ . Dengan demikian hipotesis  $H_1$  dalam penelitian ini diterima.

#### **4.2. Keterbatasan**

1. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada pegawai bagian keuangan SKPD Surakarta saja, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir.
2. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner berdasarkan persepsi responden, tidak melakukan survei langsung, sehingga ada kemungkinan mengandung kelemahan mengenai *internal validity*.

#### **4.3. Saran-saran**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Diharapkan perusahaan memberikan perhatian terhadap Sistem Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam Anggaran Berbasis Kinerja agar meningkatkan Penilaian kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah kota Surakarta.
2. Disarankan agar SKPD juga memberikan perhatian terhadap variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah karena dengan skill yang baik saja namun kurangnya disiplin akan melemahkan SKPD.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain selain kuesioner, seperti wawancara kepada responden langsung agar dapat menutupi kelemahan pada pengumpulan data menggunakan kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1) tentang Sistem Akuntansi Keuangan
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- DPR RI, 2003. Undang -Undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Friska, Indriani Yulia.2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*.Jurnal Akuntansi.
- Halim,Abdul,2002,*Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah* Edisi pertama ,Salemba empat, Jakarta
- Halim, Abdul, 2004.*Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Haspiarti.2012.*Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Epektifitas Pengendalian Keuangan. Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 2.
- Kumorotomo,Wahyudi.2005.*Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo,2007,*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi,Yogyakarta
- Mulyono,2009,*Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: ArRuzz Media.
- McLeod,Jr., George Schell.2001.*Sistem Informasi*.Andi Offset.Yogyakarta.
- Nugroho,Fauzy Ardy.2013, *Pengaruh Pengawasan,Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SeEkskarisidenan Surakarta)*. Jurnal Akuntansi
- Paulus Silalahi, Sem.2012, *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian SKPD (Studi Pemerintahan di Kota Dumai)*. Jurnal Akuntansi Vol.20 no.3
- Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ramandei, P. 2009. *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah*. Jurnal Maksi, volume 10 : 55-73. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Rico ,Kennedy,dan Rheny 2014, *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Good Government Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah* (Studi Pemerintahan Di Kabupaten Indragiri Hulu). Jurnal Ekonomi Vol. 1 no.2
- Sekaran, Uma.2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, DH. (2007). *Penguasaan konsep*. Tesis. PPS IKIP Bandung : Tidak diterbitkan.
- Wilkinson, J.W. (1992). *Accounting And Information Systems*. John.Wiley & Sons, Inc